

REVITALISASI KURIKULUM ADMINISTRASI PUBLIK DI ABAD 21

Hendrikus Triwibawanto Gedeona

STIA LAN Bandung, Jl. Cimandiri 34-38 Bandung 40115,

E-mail: herigid@yahoo.com

Revitalization of Public Administration Curriculum for 21st Century

Activity of curriculum renewal of Public Administration has ought to become matter that is inseparable in our life dynamics as a institution of education. It was caused by dynamic its environment change: local, regional, national and also global related to locus and focus of Public Administration. Departement of Public Administration not show interest them the same by effort will in realize to decrease quality from Departement of Public Administration, also disband its institution by itself. In consequence, face dynamics of environment change, society change, and paradigma shift of Public Administration that walk so quick, has become policy options that sine qua non for us for continuously conduct renewal to which we all majors curriculum pride upon. Until from time to time aspect of scientific and practical was from our Public Administration always up to date and can answer demand of environment change, even more than that can determine environment change itself.

Keywords: institution of education, public administratition, environmental change

A. PENDAHULUAN

Alvin Toffler (1980) pernah berpendapat bahwa: "...The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn", yang bila diinterpretasikan mengandung makna bahwa siapapun (individu, organisasi, negara) yang tidak dapat maju dan berkembang di abad 21 ini bukanlah mereka yang tidak dapat membaca dan menulis, tetapi adalah mereka yang tidak bisa belajar, dan tidak bisa melupakan atau melepaskan apa yang sudah dipelajari, serta tidak bisa mempelajari kembali sesuatu hal yang sudah dilupakan. Ini adalah peringatan betapa urgennya beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, belajar bagi setiap manusia merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar, karena manusia pada dasarnya akan mampu mempertahankan hidupnya hanya jika ia mampu belajar (berubah). Belajar merupakan syarat untuk dapat hidup, sama mendasarnya dengan kebutuhan makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan fisik. Dengan kata lain, hanya orang yang mau dan mampu belajar yang akan berubah, sehingga ia mampu hidup di alam yang selalu berubah. Sebaliknya dapat dikatakan bahwa orang yang tidak mau dan tidak mampu belajar, ia tidak akan mampu berubah, dan pada hakekatnya, orang yang tidak mampu berubah adalah orang yang sudah mati (Tjakraatmadja, dkk., 2006). Hal tersebut berlaku juga bagi organisasi, termasuk organisasi pendidikan tinggi.

Dalam konteks yang demikian itu, sebagai perguruan tinggi (fakultas dan/atau jurusan) yang bergelut dalam ranah Ilmu Administrasi Publik, kiranya menjadi perhatian. Hal tersebut disebabkan perkembangan dan perubahan lingkungan global dewasa ini yang bergerak begitu cepat (*fastest*), tidak menentu (*unpredictable*) dan penuh dengan pergolakan (*turbulence*). Perguruan tinggi perlu mengantisipasi dengan terencana, terarah dan berkesinambungan, baik dalam aspek kelembagaan, kurikulum maupun sumber

dayanya. Jika tidak demikian, maka perguruan tinggi akan dianggap sebagai institusi yang tidak peduli pada perubahan lingkungan. "Institusi menara gading" yang tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun internasional.

Fenomena global menunjukkan banyak negara yang sedang membangun, pemerintahnya mengalami kegagalan untuk menjalankan misi mulianya, yakni membuat bangsanya menjadi sejahtera. Para pakar yang konsen pada administrasi publik mengatakan bahwa sebab utama kegagalan negara dan pemerintahannya selama ini dikarenakan oleh keterbelakangan dan 'salah-urus' dalam administrasi atau manajemen pemerintahan (Peter Drucker, 1999). Barzelay (1982) juga berpendapat bahwa kehancuran negara berkembang karena birokrasinya bekerja lambat dan korupsi. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan pembaharuan administrasi atau manajemen pemerintahan. Hal yang senada dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992), keduanya mengatakan bahwa kegagalan pemerintah saat ini bukan pada apa (*what*) yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana (*how*) caranya pemerintah mengerjakan. Hal itu apabila diinterpretasikan lebih lanjut bermakna bahwa kegagalan pemerintah disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam aspek administrasi, yaitu cara pemerintah mengelola pemerintahannya. Lebih lanjut, Osborne yang 'berduet' dengan Plastrik (1996) juga menekankan hal yang mirip, dengan memberikan saran untuk dilakukannya pemangkasan birokrasi sehingga menjadi ramping dan efektif atau tidak menimbulkan *red-tape*.

Berbagai fenomena tersebut menjadikan pembaharuan administrasi (*administrative reform*) menjadi topik yang hangat sekaligus menjadi tindakan kebijakan penting yang diambil oleh negara-negara berkembang di Abad 21, seperti yang diutarakan oleh Guy Peters (2002) dan Ali Farazmand (2002), guna memperbaiki dan mencapai kemajuan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pembaharuan dan perbaikan administrasi pemerintahan juga dilakukan sebagai dampak dari kegagalan administrasi pemerintahan seperti yang digambarkan McLeod (1998). Ia mengemukakan bahwa krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh salah urus pada semua sektor, termasuk sektor pemerintahan sehingga negeri yang kaya dengan sumber daya alam itu terpuruk dan bangkrut serta menanggung hutang luar negeri yang amat besar. Pemerintah tidak berperan baik sebagai organisasi publik yang berkompeten dalam mengurus permasalahan publik di negeri ini.

Untuk melakukan pembaharuan itu, beberapa konsep yang berkembang di dunia dan berhasil diterapkan seperti sistem demokrasi (*globalisasi politik*), penerapan pasar bebas dan reduksi peran pemerintah (*globalisasi ekonomi*), serta penerapan *good governance* (*globalisasi administrasi publik*) juga berdampak bagi Bangsa Indonesia, dan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep pembaharuan dan/atau perbaikan itu, secara signifikan, salah satunya menjadi tanggungjawab dunia pendidikan tinggi, khususnya bagi pendidikan tinggi yang *core business*nya adalah Ilmu Administrasi Publik. Mengapa dikatakan demikian? Jawabannya jelas, karena salah satu sebab utama (*causa prima*) dari kegagalan negara kita dalam menjalankan misinya itu adalah kelemahan dalam administrasi negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila para ahli dan akademisi administrasi publik di Indonesia harus menyusun konsep-konsep pemikiran yang kontekstual (dalam kurikulum pembelajarannya) yang dapat diterapkan oleh bangsa ini, selain dalam rangka pengembangan ilmu juga merupakan tanggung jawab sosial dan moral perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia dan calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas untuk membangun bangsa di tengah perubahan lingkungan global yang berjalan begitu cepat dan dinamis serta perubahan lingkungan nasional yang

tak terelakkan lagi.

B. TUNTUTAN PERUBAHAN

Jika memperhatikan perkembangan lingkungan di Abad 21 ini, maka secara umum pendidikan tinggi Ilmu Administrasi Publik di Indonesia dihadapkan pada 3 tuntutan perubahan, yang perlu diantisipasi, selain berbagai kegagalan manajemen pemerintahan sebagaimana dipaparkan sebelumnya, yaitu pertama, berkaitan dengan perubahan paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik; kedua, globalisasi; dan ketiga, kebijakan pendidikan nasional.

1. Paradigma Administrasi Publik Abad 21

Abad 21 lebih dikenal sebagai dunia tanpa batas (*borderless society*) dan pasar global menjadi "*trademark*" yang tak dapat terelakkan oleh semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, menurut Ohmae (1991) seluruh dunia akan mencurahkan perhatiannya pada 5 hal penting, yang diakronimkan dengan istilah 5C, yaitu: *customer, company, competition, currency and country*. Khusus untuk *country* alias negara, ditekankan bahwa setiap negara harus memperhatikan dan mempersiapkan *institutional arrangement* dan situasi yang kondusif untuk beroperasinya pasar global.

Keberhasilan di pasar global, menurut Kanter (1995), perlu adanya *concept, competence and connection*. Penciptaannya dilakukan dengan membentuk *global learning organization*, yang oleh Senge (1998) disimpulkan ke dalam 5 disiplin utama, yaitu: *system thinking, personal mastery, share vision, mental model* dan *team learning*. Konsep ini bila dibawa ke dalam konteks dunia pendidikan ilmu administrasi publik, maka kita harus memiliki *the state of the art of public administration* atau kita perlu memiliki disiplin yang dirumuskan sebagai *a body of theory and teaching that must be studied and mastered to be put into practice*.

Sejauh ini, kita melihat bahwa penerapan administrasi publik telah mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang cukup signifikan, yang secara umum mengarah pada upaya untuk "meninggalkan" praktek administrasi lama (*old public administration*) menuju pada administrasi yang lebih modern (*new public administration*) yang berperspektif global dan kontekstual guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Beberapa alasan terjadinya pergeseran paradigma tersebut, menurut Hughes (1994) antara lain disebabkan oleh: *Pertama*, Kegagalan administrasi publik tradisional untuk mencapai tujuannya secara efektif, perlu diganti dengan administrasi publik modern yang berorientasi pada pencapaian kinerja dan akuntabilitas; *Kedua*, peran birokrasi klasik (Weberian) yang kaku, yang lebih menonjolkan *self interest* harus diubah menuju ke kondisi organisasi publik, kepegawaian dan pekerjaan yang lebih fleksibel; *Ketiga*, kurang jelas dan tegasnya penetapan tujuan organisasi dan pribadi serta ketiadaan ukuran kinerja yang jelas, sehingga harus diganti dengan tujuan yang lebih jelas dan penetapan ukuran keberhasilan kinerja; *Keempat*, kurang komitmen politik para staf pada elite politik yang berkuasa daripada sekedar bersikap non-partisipan atau netral; *Kelima*, peran-peran yang dijalankan pemerintah kurang didasarkan pada tuntutan dan sinyal pasar; *Keenam*, adanya tendensi yang kuat untuk mengurangi peran pemerintah dengan melakukan kontrak/kerja dengan pihak lain atau lewat privatisasi.

Oleh karena itu, dengan merefleksikan kembali inti dari Ilmu Administrasi publik yang dikemukakan oleh Woodrow Wilson ketika pertama kali dikembangkan, yang bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka pemerintah atau organisasi publik di belahan dunia saat ini mulai beradaptasi bahkan mengadopsi dengan menerapkan berbagai pendekatan atau paradigma-paradigma baru yang berkembang di lingkungan

global dalam rangka menjawab tantangan global.

Evolusi perkembangan paradigma dalam Ilmu Administrasi Publik, awal perkembangannya dimulai dengan apa yang disebut sebagai paradigma *Old Public Administration* (OPA), yang dalam praktiknya, birokrasi pemerintah diwarnai oleh pemikiran dan penerapan birokrasi Weber yang bermuara pada praktik birokrasi pemerintah yang tertutup dan keterlibatan masyarakat sangat rendah. Hal itu dikarenakan bahwa dalam masa itu, efisiensi dijadikan sebagai ukuran kerja dan bukannya *responsiveness*, model administrasi yang bersifat *top down* dan hirarkis, *bureaucratic rational choice* sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan *bureaucratic action* yang menimbulkan *red tape*.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, birokrasi pemerintah dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi, seperti administrasi negara yang partisipatif, yang menempatkan birokrasi di tengah-tengah masyarakatnya dan tidak di atas atau terisolasi darinya. (Montgomery, 1988, dalam Mariana, dkk, 2009). Konsep ini, selain ingin menempatkan birokrasi pemerintah sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan birokrasi pemerintah sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Implikasi lain dari pemikiran itu adalah bahwa sistem birokrasi pemerintahan memiliki dimensi ruang dan wilayah, yang penyelenggaraannya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Semuanya itu menuntut reorientasi peran birokrasi pemerintah.

Perkembangan tersebut melahirkan dorongan untuk meningkatkan desentralisasi, dan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang menandai bergulirnya gerakan administrasi publik baru yang dikenal dengan *New Public Administration*. Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin mengetengahkan bahwa birokrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, dan mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1999) menegaskan bahwa birokrasi pemerintah harus memasukkan aspek pemerataan (*equity*) dan keadilan sosial (*social equity*) ke dalam konsep birokrasi pemerintah, sehingga praktik administrasi publik tidak dapat netral. Dengan begitu administrasi publik baru mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan sosial dengan peran yang dominan dan terkesan represif menjadi lebih minimalis, adil, efektif dan efisien, sehingga melahirkan pembaharuan dalam praktik administrasi atau birokrasi pemerintah.

Drucker (1989) menegaskan bahwa apa yang tidak dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat, hendaknya jangan dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Itu tidak berarti bahwa birokrasi pemerintah harus besar atau kecil, tetapi pekerjaannya harus efisien dan efektif. Seperti juga dikemukakan oleh Wilson (1989), birokrasi tetap diperlukan tetapi jangan birokratis. Osborne dan Gaebler (1992) mencoba "menemukan kembali pemerintah" dengan mengedepankan konsep *entrepreneurial government*. Sehingga kemudian pengaruh *managerialisme* masuk dalam birokrasi pemerintah.

Perkembangan *managerialisme* itu mulai bergerak di negara-negara seperti Inggris, USA dan New Zealand, yang kemudian lebih dikenal sebagai "*New Public Management*" (NPM). Awal gagasan paradigma ini, dikemukakan oleh Pollit (2004) beserta rekan-rekannya. Inti dari pemikiran ini terfokus pada beberapa hal penting, yakni: akuntabilitas yang lebih baik dari birokrasi pemerintah dengan *desentralized management*; kompetisi pemerintah dan swasta dalam penyediaan pelayanan publik[†]; insentif mekanisme pasar untuk

[†] Pelayanan publik dalam konteks ini dipahami tidak sekedar pemberian layanan barang dan jasa, seperti dalam pelayanan perijinan, tetapi lebih luas, yakni dalam memproduksi kebijakan, melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan barang dan jasa, memediasi, dan sebagainya. Atau singkatnya menyelenggarakan kehidupan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat.

menghilangkan patologi birokrasi; alternatif pelayanan yang lebih luas dengan mengurangi monopoli, dan lain-lain. Sementara doktrin yang dipergunakan adalah pemanfaatan pada manajemen yang profesional, penekanan pada indikator *performance* sebagai kriteria utama, penekanan pada kontrol output, pergeseran pelayanan pada unit-unit yang lebih kecil, pergeseran kompetisi yang lebih tinggi, penekanan pada gaya sektor swasta dan penekanan pada penghematan.

Lahirnya paradigma ini mengharuskan terjadinya reformasi birokrasi secara kelembagaan. Penekanannya lebih pada upaya untuk melakukan pembaharuan dalam birokrasi pemerintah terutama dari pendekatan yang konservatif-tradisional menuju pada pendekatan yang lebih modern sebagaimana disinyalir oleh Keit dan Milward (1996) yang menyatakan bahwa "*public management is neither traditional public administration nor policy analysis since it borrows heavily from variety disciplines and methodological approaches*". Penerapan NPM ini, diharapkan mampu menjadi strategi jitu untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, yang mengalami berbagai kegagalan dalam praktik administrasi publiknya.

Namun, perkembangan paradigma NPM bukanlah tanpa kritik karena nilai dasar yang dikemukakan sangat berorientasi pada nilai di sektor privat. Hal ini menyebabkan ketimpangan praktik pelayanan birokrasi pemerintah bagi masyarakat karena lebih mendahulukan kewirausahaan dari pada hak-hak masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Orientasi NPM yang melihat masyarakat sebagai *customer* semata-mata dianggap kurang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ingin ditegakkan dalam reformasi birokrasi pemerintah dalam praktik administrasi publiknya. Sehubungan hal tersebut lahirlah konsep baru dalam perkembangan ilmu administrasi publik, yaitu *New Public Service* (NPS) yang digagas oleh Denhardt dan Denhardt (2003).

Perbedaan yang dominan dari paradigma NPM dan NPS sebetulnya terletak pada bagaimana birokrasi pemerintah dalam melihat masyarakatnya. Dalam NPM, masyarakat hanya dilihat sebagai *customer* yang harus dilayani dengan baik, sedangkan dalam NPS masyarakat dilihat sebagai *owner*, yang *empunya* negara sehingga dalam tataran negara yang demokratis dia berhak, tidak hanya dilayani dengan sebaik-baiknya akan tetapi juga menentukan jenis pelayanan, berpartisipasi dalam menyediakan pelayanan, serta mengawasi bagaimana pelayanan tersebut diberikan.

Semangat yang dibawa oleh NPS pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tuntutan perlunya diwujudkan *democratic governance* yang terus menguat dan telah menjadi paradigma baru di masyarakat global dewasa ini (Dwiyanto, 2004). *Democratic governance* atau juga sering disebut sebagai *good governance* pada dasarnya juga merupakan reformasi birokrasi pemerintah itu sendiri (Thoha, 2003) karena *good governance* adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang mendorong terjadinya otonomi, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakannya pengelolaan manajerial yang bebas dari korupsi. Untuk dapat mewujudkan itu, maka *good governance* mensyaratkan perlu keterlibatan tiga pilar utama *governance*, yaitu: pemerintah, rakyat (masyarakat madani) dan sektor swasta dalam proses tata kelola pemerintahan dengan berbagai prinsip yang telah kita sama-sama ketahui.

Mempertimbangkan perkembangan atau pun pergeseran paradigma administrasi publik, sebagaimana diuraikan sebelumnya, secara ringkas dan tegas, idealnya upaya reformasi birokrasi pemerintah kita pun harus terfokus pada bagaimana mentransfer pergeseran nilai-nilai dalam praktik administrasi publik kita, yaitu dari paradigma *Old Public Administration* yang selama ini masih dihayati oleh sebagai besar aparat birokrasi

pemerintah kita, menuju pada paradigma baru terhadap nilai-nilai yang dianjurkan oleh NPM dan NPS, atau bahkan sekarang yang lagi *trend* yaitu penghayatan dan pengimplementasian nilai-nilai yang dianjurkan oleh paradigma *good governance*. Namun, harus diingat, perlu dipertimbangkan konteks dimana konsep dan teori tersebut akan diaplikasikan. Karena secara konseptual dan teoritis, kiranya sangat menjanjikan bagi upaya terciptanya reformasi birokrasi pemerintah kita. Akan tetapi dalam praktiknya hingga saat ini, reformasi birokrasi pemerintah kita terlihat terbentur oleh berbagai tantangan dan hambatan dalam pengaplikasian konsep dan teori tersebut.

Berangkat dari pemaparan tersebut maka pada abad 21 ini agar administrasi negara suatu bangsa yang sedang membangun, termasuk Indonesia bisa berhasil, maka perlu dilakukan perubahan dalam pembelajaran ilmu dan praktek administrasi atau manajemen pemerintahannya, meliputi aspek manajemen, kelembagaan, kualitas dan perilaku sumber daya, dengan mempertimbangkan perkembangan mutakhir teori dan paradigma administrasi publik yang berkembang. Untuk maksud tersebut, PT Akademik dan Kedinasan yang memiliki Jurusan Ilmu Administrasi Publik mempunyai peran yang penting dan besar dalam konteks tersebut.

2. Globalisasi

Di samping pergeseran paradigma seperti yang disampaikan sebelumnya, pada abad 21 ini, kita dihadapkan pada tuntutan perkembangan globalisasi. Kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan informasi di belahan dunia tersebar begitu cepat dan membawa dampak pada ragam sektor, termasuk dalam sektor pemerintahan. Teknologi dapat dikatakan sebagai *primary change driver* dalam lingkungan global. Salah satu teknologi yang sangat berpengaruh adalah teknologi informasi. Teknologi ini membuat dunia menjadi tak memiliki batas atau dunia tanpa batas (*borderless society*). Informasi dapat diperoleh oleh siapa, di mana dan kapan pun.

Walter B. Wriston (1992) menuliskan bahwa revolusi informasi dengan perangkat komunikasi internet dan sistem komputer modern telah membawa pengaruh yang signifikan pada kehidupan manusia, organisasi dan negara. Kemampuan manusia, organisasi, atau negara untuk bertahan hidup tergantung sepenuhnya pada sumber kekayaan baru, yaitu informasi, pengetahuan yang diterapkan pada pekerjaan untuk menciptakan suatu nilai. Siapa yang memiliki informasi yang unggul dan terbaru, ia akan menjadi yang terbaik. Konsekuensinya, jika suatu negara atau organisasi di era globalisasi ingin mempertahankan daya saingnya, maka harus mampu membangun kualitas sumber daya manusia yang melek teknologi informasi, sehingga mampu mengelola informasi.

Kemampuan untuk mengelola informasi ini menurut Choo (1998) disebut sebagai *Knowledge Management*. Sehingga pada titik ini, Perguruan Tinggi, khususnya Ilmu Administrasi Publik, harus mengambil peran sedemikian rupa sehingga peserta didik yang dididik juga mampu mengelola informasi secara profesional. Dengan pernyataan lain peserta didik dapat mengoperasionalkan dan memanfaatkan teknologi tersebut, guna peningkatan kualitas lulusan juga kemajuan organisasi dan bangsa. Jika tidak demikian maka individu, organisasi dan negara akan kalah bersaing dalam percaturan global yang menuntut persaingan.

3. Kebijakan Pendidikan Nasional

Selain perubahan lingkungan berupa perubahan paradigma Administrasi Publik dan globalisasi, lingkungan pendidikan tinggi Ilmu Administrasi Publik di Indonesia juga dihadapkan pada perubahan kebijakan di bidang pendidikan, dari UU No. 2 tahun 1989 menjadi UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Ketiga kebijakan tersebut menjadi dasar berpijak penyelenggaraan reformasi pendidikan nasional. Diungkapkan dalam kedua kebijakan itu, bahwa pendidikan nasional termasuk pendidikan tinggi secara umum diharapkan untuk menjadi institusi pendidikan yang mampu mencetak lulusan yang berkualitas, yaitu memiliki kompetensi berpikir, bersikap dan berbuat secara cerdas, arif, taqwa dan terampil. Secara lengkap dalam UU No. 20/2003 pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk menciptakannya, kedua kebijakan mengamanatkan pada seluruh institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi untuk melakukan perubahan secara mendasar, terencana, terarah dan berkesinambungan terhadap sistem pendidikannya dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Artinya dalam melakukan pembaharuan sistem pendidikan tersebut, perguruan tinggi harus mampu mengakomodasi segala macam dinamika perubahan dalam lingkungan lokal, nasional dan internasional termasuk perubahan paradigma dan tuntutan globalisasi yang dipaparkan sebelumnya.

Adapun upaya pembaharuan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada institusi perguruan tinggi bersangkutan. Karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, UU No. 20/2003, pasal 50 ayat (6) dan pasal 51 ayat (2), bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi (kemandirian) dalam mengelola pendidikan di lembaganya, dengan berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan, selain prinsip otonomi itu sendiri. Hal yang sama kemudian ditegaskan lagi dalam UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Pasal 4, ayat 2 yang mengatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan, selain prinsip otonomi, yaitu: akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan dan partisipasi atas tanggung jawab negara.

C. REVITALISASI KURIKULUM ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa tuntutan perubahan lingkungan, yakni perubahan paradigma (*paradigm shift*) dalam Ilmu Administrasi Publik Abad 21, tantangan globalisasi, kegagalan dalam pengelolaan pemerintahan serta perubahan kebijakan pendidikan nasional yang demikian itu, maka secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada fokus dari Ilmu Administrasi Publik itu sendiri. Ilmu Administrasi Publik boleh dikatakan, mulai bergerak dari *pure public administrative science* menuju pada *applied public administrative science*.[‡] dengan memperhatikan tuntutan dan kebutuhan pasar serta perbaikan praktik administrasi publik.

Pergeseran tersebut, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, mengharuskan PT yang memiliki Jurusan Ilmu Administrasi Publik untuk melakukan pembaharuan dalam kelembagaannya, baik itu menyangkut visi, misi, dan tujuan jurusan dan program studi; kurikulum (kompetensi) yang dikembangkan; Proses pembelajaran untuk mencapai

[‡] *Pure Public Administrative Science* lebih menekankan pada pengembangan keilmuan dari Ilmu Administrasi Publik, sedangkan *Applied Public Administrative Science*, menekankan pada *tools/instrument* untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam administrasi negara, sehingga administrasi negara menjadi efektif, efisien dan berkinerja baik. Berapa *tools* tersebut antara lain: *Balanced Score Card*, *Strategic Management*, *E-Government*, *Organization Learning*, *Benchmarking*, dsbnya.

kompetensi yang diharapkan; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan Sarana dan Prasarana umum maupun penunjang proses pembelajaran. Atau menurut Pemerintah dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencakup: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi, yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi; (3) Standar Proses, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar pengelolaan, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan; (7) Standar pembiayaan, yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasional; (8) Standar penilaian, yang menyangkut mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar. Semuanya memiliki keterkaitan dalam upaya menjawab tuntutan perubahan lingkungan.

Berbagai elemen tersebut diakui merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam kerangka merevitalisasi atau melakukan perbaikan pada jurusan ilmu administrasi publik, tetapi dalam konteks penulisan artikel ini, hanya terfokus pada pembahasan kurikulum, dengan catatan tidak menganggap hal yang lain tidak penting.

Perubahan yang dideskripsikan sebelumnya, mau tidak mau membawa angin pembaharuan dalam institusi pendidikan di negara kita, secara khusus dalam tubuh Perguruan Tinggi Akademik maupun Kedinasan yang memiliki Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena tuntutan pasar lokal, nasional maupun internasional menghendaki adanya kualitas lulusan dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang baik dan kompetitif. Itu berarti berkaitan dengan kompetensi lulusan.

Untuk membentuk kompetensi lulusan yang berkualitas maka langkah yang harus dilakukan antara lain adalah menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi. Adapun kompetensi yang dibangun adalah *kompetensi yang dapat berkompetisi*. Benyamin S. Bloom, menyarankan tiga aspek utama berikut yang perlu dijadikan acuan untuk menyusun kurikulum pembelajaran. **Pertama** aspek kognitif (*kognitive aspect*) dengan penekanan pada aspek intelektualitas. Disini, kurikulum pembelajaran harus memungkinkan peserta didik untuk dapat mengingat (*remember*), memahami (*understanding*), menerapkan (*apply*), menganalisis (*analyze*), mengevaluasi (*evaluate*) dan menciptakan (*create*) apa yang disebut dengan dimensi pengetahuan (*knowledge dimension*), berupa: *factual knoweledge, conceptual knoweledge, procedural knoweledge* dan *meta-cognitive knoweledge* dari disiplin ilmu yang dipelajari. **Kedua**, aspek afektif (*affective aspect*). Dalam aspek ini diharapkan agar kurikulum pembelajaran memungkinkan peserta didik dalam hal sikap (*attitude*), nilai-nilai (*values*), minat (*interest*) dan apresiasi (*appreciation*) atau dengan kata lain agar peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungannya. **Ketiga**, aspek psikomotorik (*psychomotoric aspect*), dimana peserta didik diharapkan dapat memiliki ketrampilan (*skill*), kemampuan (*ability*), kebiasaan serta ketrampilan fisik dan mental (*habits and physical and mentality skill*).

Dengan pandangan lain, bila kita menyitir pemikiran UNESCO (1997; dalam Sindhunata: 2000), dikatakan bahwa pembaharuan kurikulum yang dilakukan oleh institusi pendidikan di abad 21 (termasuk Jurusan Ilmu Administrasi Publik) harusnya mendasari pada empat pilar pendidikan (*the fours pillars of education*) berikut: (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be* dan (4) *learning to living together*. Artinya, jika diinterpretasikan, yang **pertama**, bahwa kurikulum dan/atau materi pembelajaran yang disusun dalam suatu disiplin ilmu harus membuat peserta didik dapat *belajar untuk mengetahui* (*learning to know*) ilmu pengetahuan yang dipelajari (atau benar-benar menguasai ilmu tersebut dalam tataran filosofi/ *grand theory* /mata kuliah inti disiplin ilmu bersangkutan). Untuk itu maka tiga hal berikut perlu diperhatikan dalam pembuatan kurikulum, yaitu: materi pembelajarannya, proses pembelajaran dan si pembelajar. **Kedua**,

Learning to Do, bahwa kurikulum yang disusun harus dapat membentuk kompetensi personal dari peserta didik. Artinya, peserta didik dapat menerapkan apa yang ia dapat dari disiplin ilmu yang dipelajari di dunia pendidikan dengan kondisi atau tuntutan pasar. Kompetensi personal tersebut mencakup: ketrampilan dasar (membaca, menulis, berbicara, mendengarkan dan berhitung); ketrampilan berpikir (kreatif, kemampuan mengambil keputusan, penyelesaian masalah, memvisualisasikan, belajar dan menggunakan nalar); kualitas kepribadian (*self-esteem*, tanggung jawab, kemampuan bersosialisasi, *self management*, integritas dan kejujuran). **Ketiga**, *Learning to be*, bahwa kurikulum yang disusun harus bisa “menciptakan” atau tercapainya perkembangan yang semaksimal dan seutuhnya dalam kepribadian peserta didik, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa lulusan dari perguruan tinggi harus dapat menyadari siapa dirinya dalam hubungannya dengan orang lain, mengetahui apa yang harus dilakukan, dan melakukannya dengan baik bagi masyarakat dari disiplin ilmu yang digelutinya. **Keempat**, *Learning to living together*. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi untuk terlaksananya pembelajaran nilai-nilai kehidupan dalam kebersamaan. Artinya kurikulum yang disusun harus mampu juga mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di lingkungan, seperti: hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, gender dan sebagainya.

Dari kedua gagasan tersebut kita bisa melihat bahwa kurikulum yang ideal yang dapat membentuk kompetensi lulusan, secara ringkas harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan (ilmu dari disiplin ilmu yang dipelajari), keterampilan (berkaitan dengan keahlian untuk mengaplikasikan teori), dan sikap (berperilaku yang baik dalam menerapkan ilmu dan berinteraksi dengan lingkungan).

Ketiga dimensi tersebut boleh dikatakan menyerupai apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap kurikulum pendidikan nasional kita, termasuk kurikulum dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik. Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003, pasal 36 ayat 3) dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19/2005, pasal 25 ayat 4 dan pasal 26 ayat 4), yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah mencakup akhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, kurikulum yang disusun harus memperhatikan: (1) peningkatan iman dan taqwa; (2) peningkatan akhlak mulia; (3) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat; (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (6) tuntutan dunia kerja; (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (8) agama; (10) dinamika perkembangan global; dan (11) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Artinya kita bisa menginterpretasikan dan membahasakan dengan konsep yang lain bahwa kurikulum yang disusun dalam ranah Ilmu Administrasi Publik, idealnya mencakup atau dapat menampung tiga misi utama, yakni: (1) perilaku etis (*ethical conduct*); (2) kemampuan untuk melayani masyarakat (*ability to serve people*); dan (3) profesionalisme (*professionalism*). Perilaku etis, maksudnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik, harus menghasilkan lulusan yang mampu bersikap dan bertindak sesuai standar etika yang berlaku; kemampuan untuk melayani masyarakat, maksudnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik menghasilkan lulusan yang dengan bakat dan ketrampilan yang dimilikinya, mampu memperbaiki kualitas masyarakat; dan profesionalisme, maksudnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik mampu menghasilkan lulusan yang memiliki standar profesionalisme yang tinggi, mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Idealisasi yang diharapkan ini harus menjadi komitmen dari seluruh Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Kedinasan yang memiliki Jurusan Ilmu Administrasi

Publik untuk diwujudkan. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pembaharuan kurikulum, aksentuasi kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Akademik dan Kurikulum Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Kedinasan?

Pertanyaan tersebut muncul karena menurut penulis ada perbedaan yang kuat mengenai aspek-aspek kompetensi yang ditransformasikan kepada peserta didik, di lingkungan Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Kedinasan. Secara umum, menurut penulis, Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Akademik, kurikulumnya relatif lebih menekankan pada pengembangan keilmuan dari Ilmu Administrasi Publik (*Pure Public Administrative Science*). Sementara itu pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Kedinasan, relatif lebih menekankan pada aplikasi dari Ilmu Administrasi Publik (*Applied Public Administrative Science*). Keduanya secara institusional berbeda. Perbedaannya pada: pendidikan akademik dengan peserta didiknya adalah dari masyarakat umum yang belum bekerja, yang lainnya adalah pendidikan profesi^s dengan peserta didik yang telah bekerja (aparatur). Dengan pernyataan lain, bila kita meminjam pendapat Bloom, maka pada Perguruan Tinggi Akademik, boleh dikatakan bahwa prosentase kompetensi yang ditekankan adalah pada aspek kognitif dan afektif ketimbang aspek psikomotorik, sedangkan pada Perguruan Tinggi Kedinasan, prosentase kompetensi ditekankan pada aspek psikomotorik dan kognitif daripada aspek afektif.

Meskipun demikian, apa yang menjadi *state of the art of public administration science* tetap menjadi jiwa dari kurikulum yang dibuat oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Perguruan Tinggi Akademik maupun di Perguruan Tinggi Kedinasan. Dengan perkataan lain kurikulumnya tidak pernah lepas dari ranah Ilmu Administrasi Publik. Hal-hal yang menjadi *ruh* dan ruang lingkup dari disiplin ilmu, tetap harus diakomodasikan dalam kurikulum, dengan berbagai inovasi di dalamnya. Antara lain: (1) Perkembangan teori organisasi dan manajemen; (2) Lingkungan politik dalam Ilmu Administrasi Publik, berkaitan dengan proses kebijakan publik; (3) Budaya organisasi publik; (4) Hubungan antar kelembagaan pemerintahan; (5) Perilaku organisasi; (6) Revolusioner managerialisme dalam organisasi publik; (7) Manajemen kinerja; (8) Manajemen Strategis pada sektor publik; (9) Kepemimpinan; (10) Manajemen personalia dan hubungan kerja; (11) Akuntabilitas pada sektor publik; (12) Manajemen keuangan publik; (13) Auditing dan Akuntansi dalam sektor publik; (14) Evaluasi program; (15) Penerapan *reinventing government*; dan (16) Etika dalam administrasi publik (Shafritz dan Russel: 1997), harus dimuat dalam kurikulum yang dikembangkan.

Demikian juga hal-hal seperti: (1) Apa yang dilakukan oleh sarjana Ilmu Administrasi Publik; (2) Metodologi penelitian Administrasi Publik; (3) Ilmu sosial dan politik yang terkait dan menunjang analisis sarjana Ilmu Administrasi Publik; (4) Kecenderungan-kecenderungan mutakhir perkembangan dunia seperti teknologi informasi, perkembangan isu-isu kontemporer di tingkat global, nasional dan daerah, seperti demokratisasi, gender, HAM, desentralisasi, reformasi birokrasi, dan lain-lain, juga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum. Sehingga mata kuliah yang menjadi ciri khas atau identitas dari Ilmu Administrasi Publik selalu saja sama dan harus ada (kalau tidak disebut dengan nama yang berbeda), antara Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Kedinasan yang memiliki Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Meskipun dalam

^s Pendidikan profesi menurut UU SISDIKNAS, No. 20/2003, pasal 15 (dalam penjelasannya) adalah pendidikan tinggi setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan Keahlian Khusus.

perundang-undangan telah diatur, bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk menentukan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (UU No. 20/2003, pasal 38 ayat 3, 4)

Mata kuliah yang dimaksud dalam Jurusan Ilmu Administrasi Publik disebut sebagai mata kuliah inti/wajib bagi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, yang menurut penulis, dengan mempertimbangkan berbagai kurikulum yang ada di berbagai jurusan Ilmu Administrasi Publik di berbagai PT adalah sebagai berikut:

- a. Pengantar Ilmu Administrasi Publik
- b. Teori Administrasi Publik
- c. Teori Organisasi Publik
- d. Pengantar Ilmu Kebijakan Publik
- e. Teori Kebijakan Publik
- f. Hukum Administrasi Negara
- g. Etika Birokrasi
- h. Teori dan Perilaku Organisasi
- i. Metodologi Penelitian Administrasi
- j. Kepemimpinan dalam Organisasi Publik
- k. Statistika Sosial; dsbnya.

Selanjutnya, untuk membandingkan bagaimana perbedaan penekanan kompetensi dalam kurikulum antara Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Kedinasan, berikut sedikit diulas pemikiran mengenai hal tersebut.

Secara umum kurikulum yang dikembangkan di STIA LAN saat ini masih terfokus pada dua tingkatan kemampuan yaitu pada tingkatan S1 dan tingkatan S2, yang boleh dikatakan hampir sama pada PT Akademik. Namun dalam proses pembelajarannya terlihat amat berbeda, selain nama mata kuliah yang berbeda. Hal ini terjadi karena kompetensi yang diharapkan oleh STIA LAN terhadap lulusannya berbeda dengan lulusan dari PT Akademik. Oleh karena itu, dalam praktek proses pembelajaran terhadap mata kuliah yang diberikan juga berbeda dengan PT Akademik.

Sebagai PT Kedinasan yang 'mengusung pendidikan profesi', kurikulum pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa tidak saja menanamkan masalah keilmuan Administrasi Publik, tetapi dalam mata kuliah yang diajarkan terkandung juga jenis kompetensi (keahlian/ketrampilan) khusus yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal ketika kembali bekerja di lingkungan kerjanya. Hal itu dapat terlihat pada bobot SKS dan alokasi waktu pembelajaran per minggu untuk mata kuliah yang diberikan, baik kegiatan tatap muka, praktikum dan praktik lapangan.

Perbandingan alokasi waktu untuk ketiga kegiatan tersebut bervariasi tergantung mata kuliah yang diajarkan. Misalnya untuk mata kuliah Teori Administrasi Publik, karena merupakan mata kuliah yang bersifat konseptual ketimbang praktik, maka alokasi waktu untuk tatap muka lebih banyak daripada praktikum dan praktik lapangan. Sedangkan untuk mata kuliah seperti Administrasi Perkantoran, yang memiliki karakteristik yang lebih menekankan pada praktikum, maka kegiatan tatap muka lebih sedikit daripada kegiatan praktikum dan praktik lapangan.

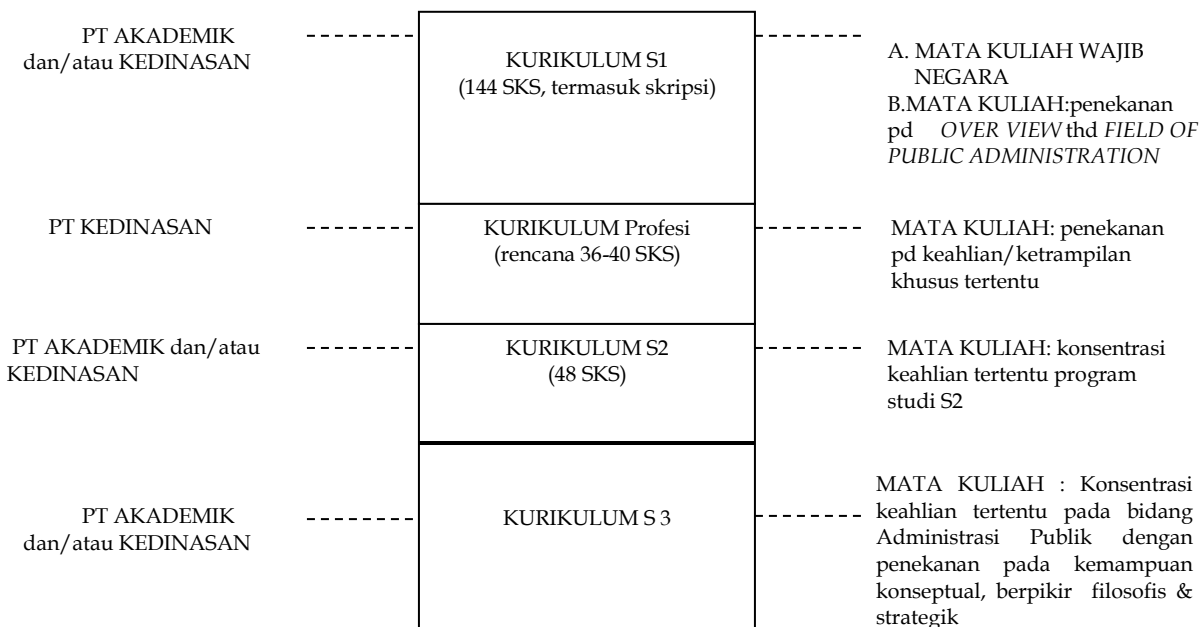
Pembobotan SKS dan alokasi waktu pembelajaran tiap mata kuliah, meskipun diakui belum optimal, namun ke depan akan diupayakan lebih maksimal lagi sebagai antisipasi terhadap tuntutan perubahan Sistem Pendidikan Kedinasan, yang menekankan pada pendidikan profesi.

Disamping pembobotan SKS dan alokasi waktu pembelajaran untuk tiga kegiatan tersebut, untuk memberikan kemampuan kepada lulusan STIA LAN, dalam proses

pembelajaran, teknik pembelajaran yang diberikan oleh dosen dilakukan juga dengan cara metode studi kasus (*case study*). Hal ini berkaitan dengan tujuan STIA LAN untuk mencetak lulusan STIA LAN yang dapat menyelesaikan masalah-masalah (*problem solving*) yang dihadapi di unit kerjanya. Berkaitan dengan itu juga laporan akhir atau skripsi yang dibuat oleh mahasiswa STIA LAN diwajibkan mengarah pada *problem solving* yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Menyikapi perkembangan Sistem Pendidikan Nasional yang begitu cepat, terutama berkaitan dengan tuntutan terhadap PT Kedinasan sebagai PT Profesi, maka secara perlahan, terencana dan pasti, STIA LAN pun sedang mengembangkan kurikulum pendidikan profesi, dengan lebih terfokus pada pencetakan lulusan yang memiliki ketrampilan atau keahlian khusus. Bobot kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah untuk pendidikan profesi ini antara 36-40 SKS, atau dapat dikatakan setara dengan level S2 pada PT Akademik. Sampai saat ini, rencana pengembangan itu terfokus pada beberapa aspek dalam domain keilmuan Administrasi Publik, antara lain: Keperencanaan, Keuangan Daerah/Negara, Kesekretarisan, Keprotokolan, Kehumasan, Kepegawaian, Legal Drafting, Kebijakan Publik, dan Logistik, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya lulusan STIA LAN dapat memiliki "profesi", katakanlah sebagai "Administrator" yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan (Profesi Perencana); Administrator yang memiliki keahlian dalam bidang logistik (Profesi Logistor); Administrator yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan daerah/negara, Administrator yang memiliki keahlian dalam bidang kebijakan publik (Profesi Analisis Kebijakan Publik), dan sebagainya. Untuk hal ini, kami mengharapkan PERSADI sebagai organisasi profesi yang mewadahi sarjana lulusan Ilmu Administrasi (Publik maupun Bisnis), dapat memberi masukan dan dukungan terhadap upaya pemberian gelar atau jabatan profesi tersebut.

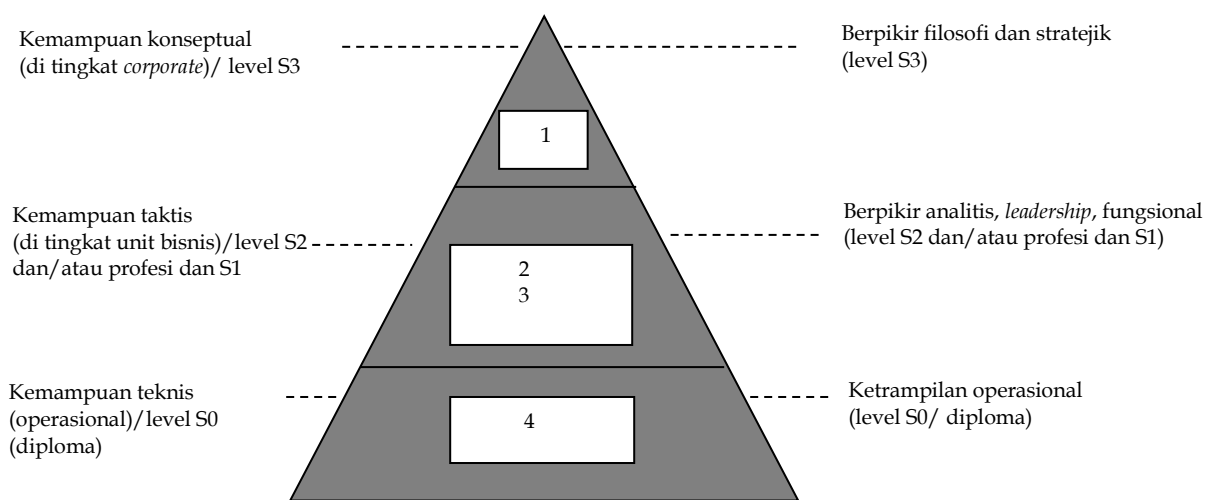
Uraian tentang persamaan dan perbedaan kurikulum antara PT Akademik dan Kedinasan tersebut, secara visualisasi dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1
Perbedaan Kurikulum Antara PT Akademik dan Kedinasan

Selanjutnya, berkaitan dengan kurikulum ini, mengingat Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang berkembang di Indonesia, meliputi jejang pendidikan S1, S2, dan S3, maka *prinsip relevansi* dan *sinkronisasi vertikal maupun horisontal* kurikulum S1, S2, dan S3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik perlu diperhatikan secara seksama. Jangan sampai terjadi ketiadaan relevansi dan sinkronisasi ketiga kurikulum dari jejang pendidikan yang dikembangkan. Karena hal tersebut berkaitan dengan jaminan terhadap *quality control* dan *quality assurance* dari Jurusan/Program Studi yang dikembangkan serta nilai akreditasi yang akan diperoleh.

Sebagai pengelola jejang pendidikan S1, S2, dan S3 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, perlu diperhatikan secara seksama aspek-aspek kompetensi atau kemampuan dari tingkatan pendidikan disiplin Ilmu Administrasi Publik yang dikembangkan. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2
Kompetensi Tingkatan Pendidikan Disiplin Ilmu Administrasi Publik

D. PENUTUP

Perkembangan lingkungan global yang begitu cepat, memaksa kita untuk melakukan pembaharuan dalam institusi pendidikan kita. Oleh karena itu, hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan reformasi kelembagaan, secara khusus mengenai kurikulum Ilmu Administrasi Publik, sehingga lulusan yang kita hasilkan dapat bersaing di pasar lokal, nasional dan global. Dengan perkataan lain, bagaimana kurikulum Ilmu Administrasi Publik dapat mempertahankan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah arus pragmatisme global yang berorientasi pada kepentingan pasar.

Untuk maksud tersebut, maka pengembangan kompetensi yang dapat berkompetisi, sudah menjadi keharusan bagi PT Akademik maupun Kedinasan yang memiliki Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Hal ini selain dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan juga dalam rangka membantu pemerintah mengatasi kegagalan dalam mengelola pemerintahan yang selama ini terjadi. Guna mewujudkan kompetensi yang diharapkan

tersebut, maka beberapa hal berikut meskipun sebagai pendukung, harus dipersiapkan secara matang, seperti tenaga pendidik dan kependidikan, proses pembelajaran juga sarana prasarana umum dan penunjang proses pembelajarannya.

Selanjutnya, hal yang penting dan yang perlu diperhatikan pula dalam sistem pendidikan tinggi kita adalah bahwa kita tidak perlu terjebak dalam dilema nilai antara mendidik peserta didik agar menguasai teori dan mengenyampingkan praktek atau mendidik peserta didik yang mampu menguasai praktek dan mengenyampingkan teori. Jika kita menekankan yang nilai yang kedua, menguasai praktek dan mengenyampingkan teori, maka pendidikan menjadi *training oportunistik*. Mahasiswa hanya ingin cepat-cepat dapat ijazah atau gelar lalu selesai. Dunia kerja akan segera menerimanya sebagai pekerja yang mungkin agak terampil tapi tidak pasti berpandangan luas, kreatif dan dapat membawa organisasi dan/atau negara ke masa depan yang baru. Sebab mereka ini hanya akan dapat menyesuaikan dengan pembangunan yang sudah tersedia, bukannya sebagai pembaharu masyarakat. Sebaliknya pilihan jatuh pada nilai yang pertama, lebih mengedepankan penguasaan teori ketimbang praktik, maka barangkali tak segera mungkin kita mendapat pekerja-pekerja praktis bagi dunia kerja. Namun dalam jangka waktu yang panjang kita akan mempunyai orang-orang kreatif yang bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi organisasi dan bangsa tercinta ini.

Meskipun dilema itu dirasakan, secara konseptual seperti yang dikatakan Bloom, sebaiknya dunia pendidikan tinggi, khususnya departemen dan/atau jurusan Ilmu Administrasi Publik perlu menciptakan keseimbangan antar kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik atau istilah sekarang adalah kemampuan intelektual, kemampuan untuk berelasi, keahlian dan kemampuan spritual. Jangan membuat sistem pendidikan administrasi publik yang tidak memerdekakan peserta didik, atau membelenggu peserta didik itu sendiri, sehingga pada akhirnya membentuk pribadi yang tidak sempurna. Karena itu bagi penulis, pendidikan tinggi, khususnya dalam lingkup Ilmu Administrasi Publik, bukan hanya sekedar *transfer of knowledge*, tapi terutama *transfer of values*. Karena pada tataran inilah peserta didik tersebut akan bermakna. Ia dapat bersikap dan berperilaku dengan baik dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

Barangkali, manusia Indonesia saat ini, berada dalam kondisi krisis nilai disebabkan ketiadaan *transfer of values* tadi, sehingga meskipun banyak orang cerdas/pintar yang dihasilkan oleh dunia pendidikan, tetapi sikap dan perilakunya buruk. Akibatnya banyak sekali terjadi 'penyakit-penyakit sosial' dalam masyarakat, bahkan dalam birokrasi pemerintah, seperti korupsi. Oleh karena itu, visi dan misi Jurusan Ilmu Administrasi Publik di perguruan tinggi, haruslah demikian. Membuat peserta didik itu bermakna dan sekaligus merdeka dalam kedewasaan intelektual dan kebajikannya. Sehingga ada kesadaran kritis untuk menilai apa yang dilakukan dalam praktik dinamika kehidupan dan penyelenggaraan administrasi publik, sudah benar atau salah, sudah baik atau masih buruk.

Paulo Freire (1974) pernah berkata bahwa pendidikan haruslah diabdikan untuk menumbuhkan kesadaran kritis si pembelajar, kesadaran kritis untuk menilai dirinya sendiri, menilai orang lain, dan menilai lingkungan di sekitarnya. Karena menurut dia, pendidikan seperti itu pada akhirnya akan menghindari terjadinya dehumanisasi, masifikasi dan terciptanya '*unthinking manageable agglomeration*', atau sekedar barisan robot-robot mekanik yang bergerak dalam logika mesin dan pasar. Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan kita juga berkata bahwa pendidikan harus diarahkan untuk memerdekakan manusia, yaitu merdeka dalam definisi mampu berdiri sendiri (*zelfstandig*), tidak tergantung orang lain (*onafhankelijk*), dan dapat mengatur diri sendiri (*vrijheid, zelfbeschikking*), dalam kapasitasnya sebagai anggota persatuan rakyat. Jadi

penulis berpikir bahwa visi dan misi pendidikan jurusan Ilmu Administrasi Publik ke depan adalah seperti itu.

Perwujudan idealisme seperti diuraikan sebelumnya akan tergantung pada pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di PT Akademik maupun Kedinasan yang memiliki Jurusan Ilmu Administrasi Publik dalam mengelola sistem atau penyelenggaraan proses pembelajaran di institusinya masing-masing.

REFERENSI

- Barzelay, Michael. 1992. *Breaking Through Bureaucracy: A New Vision for Managing In Government*. Barkeley University Of California Press.
- Choo, C.W. 1998. *The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create, Knowledge, and Make Decisions*. New York: Oxford University.
- Denhardt Janet W. & Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Services*. New York: M.E. Sharpe.
- Drucker, Peter. 1999. *Management Challenges for The 21st Century*. New York: Harper Bussiness.
- Farazmand, Ali. 2002. *Administrative Reform in Developing Nations*. London: Praeger Publishers.
- Hughes, O. 1994. *Public Management and Administration: An Introduction*. New York: St. Martin Press.
- Osborne, David, & Plastrik, P. 1992. *Banashing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Massachussetts: Addison Wesley, Publishing Company.
- Osborne, David, & Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. terj., Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peters, Guy B. 2001. *The Future of Governing*. 2nd ed. Rev. University Press of Kansas.
- Senge, Peter. 1998. *The Fifth Dicipline*, New York.
- Shafritz, J.M & E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
- Sindunata. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tjakaraatmadja, Jann Hidayat, dkk. 2006. *Knowledge Management dalam Konteks Organisasi Pembelajar*. Bandung: SBM ITB.
- Toffler, Alvin. 1980. *The Third Wave*.. London: Pan Books.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Walter B. Wriston. 1992. *The Twilight of Sovereignty. How the Information Revolution is Transforming Our World*. MacMillan Publishing.